

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Dan yang tidak kalah pentingnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operansi yang tinggi dan teknologi canggih serta terorganisir (*organization crime*) dan bersifat transnasional (*transnational crime*).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkoba serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Untuk mencapai tujuan tersebut maka menggunakan metode secara Yuridis-Normatif, selain itu penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginvestarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka, kemudian metode analisis data disajikan secara kualitatif.

Pendekatan Yuridis digunakan dalam penelitian ini untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya. Ada pun upaya yang dapat digunakan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba menggunakan upaya preventif artinya supaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan tidak melakukan hukum pidana.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut,

- 1) Penerapan hukum pidana materil oleh hakim pada perkara no 227/Pid.Sus/2018/PT DKI tidak tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkoba , dan Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkoba,
- 2) Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dalam menjatuhkan pidana tidak tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT DKI tidak menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 yang menyatakan bahwa ancaman pemberian sanksi bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang sama lebih dari satu kali atau *Residivis* dapat ditambah sepertiga dari jumlah ancaman sanksi yang diterimanya.

**Kata Kunci : Kejahatan, Narkoba, Residivis**

## ***ABSTRACT***

This research is developed by the development of crime or drug abuse from time to time shows an increasing tendency. These improvements include the influence of technological advances, globalization and the rush of information flows. And that is not less important because of the limitations possessed by the law enforcement officers in the eradication of drug abuse. Narcotics crime is one of the unusual forms of crime that is done systematically, using high operancy mode and advanced technology as well as ORGANISISR (Organization crime) and transnational crime.

The purpose of this study is to determine the application of criminal liability against narcotics abuse and the judgment of judges in the criminal offence against narcotic abuse. In order to achieve this goal, it uses a juridical-normative method, and the authors use a method of data collection with a literature study technique conducted by searching, recording, investigating, analyzing, and studying data that is in the form of library materials, then the method of data analysis is presented qualitatively.

The juridical approach was used in the study to locate and break down components of an issue to be studied deeper and then to associate it with the law, the rules of law and the prevailing legal norms as the solver for the problem. There are efforts that can be used in treating drug abuse cases using preventive efforts to prevent narcotic abuse by not committing criminal law.

From the research conducted, the authors get the following result, 1) the application of material criminal law by the judge in case no 227/Pid. Sus/2018/PT DKI not appropriate. The Prosecutor uses 2 (two) allegations, namely: Primair article 112 paragraph (1) of the law. RI. No. 35 year 2009 about Narcotics Jo Article 132 (1) ACT. Ri. No. 35 year 2009 about Narcotic, and subsidiary of Air article 127 clause (1) Letter a act. RI. No. 35 year 2009 on Narcotics, 2) legal considerations by judges against narcotics abuse criminal acts I for myself in dropping improper pipetting due to judge in article 227/Pid. Sus/2018/PT DKI does not impose EAS pursuant to sections 486, 487, and 488 stating that the threat of sanction for someone who has committed the same criminal offence more than once or is a resistance can be plus one-third of the number of sanctioned threats received.

**Keywords: crime, narcotics, Residivis**